

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PERKELAHIAN ANTAR KELOMPOK**

**(Studi Kasus di Kabupaten Pangkep Tahun 2012-2014)**



**OLEH**

**ANDI MEGA REZKIA**

**B111 11 078**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2015**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PERKELAHIAN ANTAR  
KELOMPOK (Studi Kasus di Kabupaten Pangkep Tahun 2012-2014)**

**OLEH:**

**ANDI MEGA REZKIA**

**B111 11 078**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Program Sarjana Dalam Program Kekhususan Hukum Pidana  
Studi Ilmu Hukum**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2015**



# **PENGESAHAN SKRIPSI**

## **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PERKELAHIAN ANTAR KELOMPOK**

**(Studi Kasus di Kabupaten Pangkep Tahun 2012-2014)**

**Disusun dan diajukan oleh**

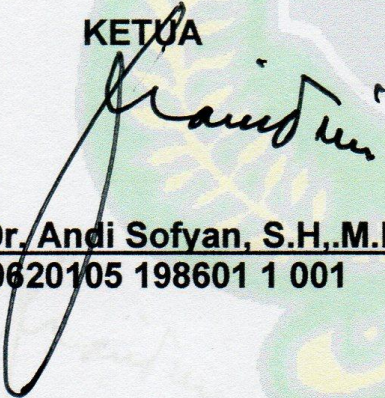
**ANDI MEGA REZKIA  
B 111 11 078**

**Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum  
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**


**Pada Hari Selasa, 28 April 2015  
Dan Dinyatakan Diterima**

### **PANITIA UJIAN**

**KETUA**

  
**Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19620105 198601 1 001**

**SEKRETARIS**

  
**Hj. Haeranah, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19661212 199103 2 002**

**A.n Dekan  
Pembantu Dekan Bidang Akademik,**

  
**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H**  
**NIP. 19610607 198601 1 003**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

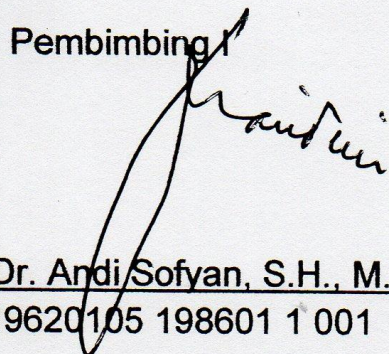
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI MEGA REZKIA  
Nomor Induk : B111 11 078  
Bagian : HUKUM PIDANA  
Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PERKELAHIAN  
ANTAR KELOMPOK (Studi Kasus di Kabupaten Pangkep  
Tahun 2012-2014).

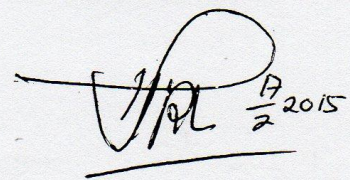
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, 11 Februari 2015

Pembimbing I

  
Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.  
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing II

  
Hj. Haeranah, S.H., M.H.  
NIP. 19661212 199103 2 002



## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **ANDI MEGA REZKIA**

No. Pokok : B111 11 078

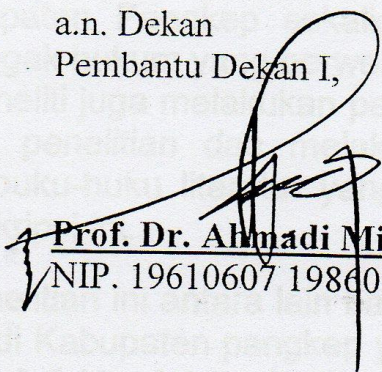
Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis terhadap Perkelahian Antar Kelompok (Studi Kasus di Kabupaten Pangkep Tahun 2012-2014)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2015

a.n. Dekan  
Pembantu Dekan I,

  
**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**  
NIP. 19610607 198601 1 003



## **ABSTRAK**

ANDI MEGA REZKIA (B111 11 078), dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian Antar Kelompok (Studi Kasus di Kabupaten Pangkep tahun 2012-2014)”. Di bawah bimbingan Bapak Andi Sofyan selaku Pembimbing I dan Ibu Hj.Haeranah selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal yakni faktor-faktor penyebab terjadinya perkelahian antar kelompok di Kabupaten Pangkep dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam penanggulangan perkelahian antar kelompok yang terjadi di Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dan metode penelitian lapangan (field research) dan dilaksanakan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, khususnya di Kantor Kepolisian Resort Pangkep. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas yakni kepada beberapa pelaku kejahatan dan kepada beberapa anggota Reserse dan Kriminal di kepolisian Resort Kabupaten Pangkep guna memperoleh informasi mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perkelahian antar kelompok di Kabupaten Pangkep sekaligus upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Peneliti juga melakukan pengumpulan data-data berkenaan dengan objek penelitian dan melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini antara lain bahwa, faktor penyebab perkelahian antar kelompok di Kabupaten pangkep yang terjadi di wilayah hukum polres Pangkep adalah faktor Internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri pelaku meliputi sifat emosional sehingga mudah tersinggung, tidak dapat menyesuaikan diri dengan keanekaragaman. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor dari luar yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang seperti faktor lingkungan, minuman keras, solidaritas, dan faktor pendidikan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah atau menekan terjadi kejahatan khususnya kekerasan yang dilakukan dalam perkelahian antar kelompok yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian Antar kelompok (Studi Kasus di Kabupaten Pangkep Tahun 2012-2014)”**. Penulis menyadari bahwa hanya dengan petunjuk-Nya jugalah sehingga kesulitan dan hambatan dapat penulis selesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Strata Satu (S1) pada bagian Hukum Pidana program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan tantangan baik yang sifatnya ekstern maupun intern. Dengan keyakinan yang teguh, usaha, doa. dan semangat yang diberikan oleh orang-orang terdekat maka kendala tersebut dapat penulis atasi dengan baik.

Dengan rasa hormat penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis **Ayahanda Drs. H. Andi Nadir Ratu, MM dan Ibunda Dra. Hj. Islamiyah Saleh Pahar** atas segala pengorbanan, kasih sayang, motivasi dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, serta doa yang tak henti-hentinya

dipanjatkan hanya semata-mata mengharapkan keberhasilan penulis, Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku, **Andi Tenri Utana,ST., Andi Regita, dan Andi Rhiyad Absehar** beserta seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada penulis.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada berbagai pihak atas keterlibatannya dalam membantu dan membimbing penulis, yakni

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Syamsuddin Muhtar selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Haeranah selaku Pembimbing II, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, bimbingan, arahan, dan saran yang selalu diberikan kepada Penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.



5. Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik Penulis yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama berada di bangku kuliah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., dan H. M. Imran Arief S.H., M.H., serta Dr. Amir Ilyas S.H., M.H., selaku penguji yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan dan masukan kepada penulis yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S dan bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H selaku Ketua dan Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
8. Kepala Bagian Perpustakaan fakultas Hukum Unhas beserta staf, terima kasih atas kerjasamanya sehingga memudahkan penulis dalam mendapatkan data kepustakaan yang dibutuhkan oleh penulis dalam proses penelitian.
9. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Pangkep beserta jajaran atas bantuan dan kerjasamanya selama penelitian sehingga penulis mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Serta terima kasih kepada IPTU Abdul Kadir T, SH, selaku Kaur Bin Ops Sat Reskrim dan BRIGPOL Adi Saputro selaku Ba Min Ops Sat Reskrim beserta staf lainnya yang senantiasa membantu penulis selama melakukan penelitian di kantor Polres Pangkep.

10. Keluarga besar UKM Bengkel Seni Dewi Keadilan (BSDK) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terutama Diksar XII yaitu Ridha, Linda, Eki, Aulia, Puput, Riska, Adhe, Upi, Amel, Amha dan iyak, serta semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas persaudaraannya yang pada periode kepengurusan penulis banyak mendapat ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tidak terbatas nilainya dan sangat bermanfaat bagi penulis.
11. Seluruh Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya angkatan Mediasi Tahun 2011 dan teman-teman KKN Reguler angkatan 87 Kabupaten Pinrang tahun 2014.
12. Teman-temanku, Cica, Dita, Salmah, Amel, Putri, Lia, Asrini, fanny, Ika, Rima, Gina, Ain, Rini dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama di bangku perkuliahan dan proses penyusunan skripsi.
13. Teman-temanku yang ada di Pangkep, Sakinah, isma, dan ika terima kasih karena senantiasa selalu memberi dukungan dan bantuan secara moril dalam proses penyusunan skripsi penulis serta ketulusan hati teman-teman untuk menerima segala kelebihan dan kekurangan dalam diri penulis.
14. Kanda Raihan, SH., fadillah, beserta ibu Nia yang senantiasa memberikan ilmu, motivasi dan masukan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.



15. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Sebagai Manusia biasa yang tak pernah luput dari khilaf dan salah, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah dan semoga semua yang telah kita kerjakan dengan niat baik mendapatkan berkah, Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, April 2015

ANDI MEGA REZKIA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iii
ABSTRAK .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Kriminologi .....	7
1. Pengertian Kriminologi .....	7
2. Pembagian Kriminologi .....	12
3. Teori Kriminologi .....	13
B. Kejahatan .....	17
1. Pengertian Kejahatan .....	17
2. Unsur-unsur Kejahatan .....	19
3. Teori Sebab Kejahatan .....	19
4. Kejahatan Dengan Kekerasan .....	30
5. Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	32
C. Perkelahian Antar Kelompok .....	35
1. Pengertian Perkelahian Antar Kelompok .....	35
2. Perkelahian Antar Kelompok Sebagai Suatu Kejahatan .....	37
3. Ketentuan Pidana Perkelahian Antar Kelompok .....	39
BAB III METODE PENELITIAN .....	41
A. Lokasi Penelitian .....	41
B. Jenis dan Sumber Data .....	41
C. Teknik Pengumpulan Data .....	41
D. Analisis Data .....	42



#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
B. Data Perkelahian Antar Kelompok di Kabupaten Pangkep .....	45
C. Faktor-faktor Penyebab Perkelahian Antar Kelompok .....	50
D. Upaya-upaya Aparat Kepolisian dan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Perkelahian Antar Kelompok di Kabupaten Pangkep .....	57

#### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	64

DAFTAR PUSTAKA.....	65
---------------------	----

#### LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

TABEL 1 Jumlah Perkelahian Antar Kelompok Studi Kasus di Kabupaten Pangkep Tahun 2012-2014 .....	46
TABEL 2 Data Kelompok Umur Perkelahian Antar Kelompok Studi Kasus di Kabupaten Pangkep Tahun 2012-2014 .....	47
TABEL 3 Dampak yang ditimbulkan Akibat Perkelahian Antar Kelompok Studi Kasus di Kabupaten Pangkep Tahun 2012-2014 .....	49



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang terbentang dari sabang sampai merauke. Sebagai negara kepulauan Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, budaya, ras, agama, bahasa dan yang lainnya. Oleh karena itu masyarakat Indonesia disebut masyarakat majemuk atau multikultural. Kemajemukan tersebut dapat menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Indonesia sebagai kekayaan budaya bangsa. Disisi lain dapat menjadi tantangan dalam mempertahankan dan menyatukan keanekaragaman tersebut.

Indonesia selain dikenal dengan kemajemukan masyarakatnya baik dari sisi etnisitas, budaya, serta agama dan kepercayaannya, kemajemukan juga menjangkau pada tingkat kesejahteraan ekonomi, pandangan politik serta kewilayahan, yang semua itu sesungguhnya memiliki arti dan peran strategis bagi masyarakat Indonesia. Meski demikian, secara bersamaan kemajemukan masyarakat itu juga bersifat dilematis dalam kerangka penggalan, pengelolaan, serta pengembangan potensi bagi bangsa Indonesia untuk menapaki jenjang masa depannya.

Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat berpotensi membantu bangsa Indonesia untuk maju dan berkembang bersama, sebaliknya jika

kemajemukan masyarakat tersebut tidak dikelola dengan baik maka akan menyuburkan berbagai prasangka negatif antar individu dan kelompok masyarakat yang akhirnya dapat merenggangkan integritas sosial.

Setiap manusia adalah individu yang unik. setiap orang memiliki pemikiran, perasaan, pendirian, kepentingan, maupun latar belakang yang berbeda sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Dalam waktu yang bersamaan masing-masing individu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda begitupun sebaliknya.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri, bahkan kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya dalam keadaan tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain (Abdullah Marlang, dkk, 2011).

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang terus berkembang ini secara perlahan mempengaruhi perubahan sosial budaya dan kultur bangsa Indonesia. Perubahan pergaulan hidup, tingkah laku dan pola pikir masyarakat yang mengakibatkan perubahan pada diri

manusia yang terjadi secara lambat maupun cepat yang dapat menyebabkan terjadinya suasana harmonis dan disharmonis. Perubahan merupakan suatu hal yang lazim dan wajar terjadi dalam lingkungan masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi tidak selamanya berdampak positif, tetapi dapat pula berdampak negatif bagi masyarakat.

Sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan manusia lain, maka merupakan suatu hal yang sangat wajar jika dalam interaksi tersebut setiap orang memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda. Hal yang menjadi permasalahan apabila perbedaan tersebut dijadikan suatu alasan bagi seseorang atau kelompok untuk melakukan suatu perbuatan ke arah yang menyimpang karena dipengaruhi keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi atau terpuaskan dalam kehidupannya.

Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, setiap individu atau kelompok akan berusaha untuk mempertahankan pendapat dan pandangannya sesuai dengan kebutuhan dan apa yang menjadi tujuannya masing-masing. Hal yang demikian tak jarang dapat menimbulkan suatu konflik, dalam usaha mencapai tujuan yang bersifat perorangan atau suatu kelompok tertentu.

Konflik merupakan proses sosial yang senantiasa terjadi dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan pendapat maupun tujuan dalam mencapai suatu hal tertentu. Konflik yang diakibatkan oleh perbedaan ini dapat menyangkut bidang politik, ekonomi,



sosial, dan budaya. Konflik yang terjadi di dalam masyarakat apabila dibiarkan maka akan menimbulkan perilaku-perilaku yang menyimpang yang akan terus berkembang.

Berkaitan dengan masalah kejahatan maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari kejahatan itu sendiri, Bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Kejahatan juga merupakan salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat dan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban umat manusia (Romli Atmasasmita, 2010:63).

Salah satu fenomena yang sering terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia ini adalah perkelahian. Permasalahan ini bukanlah fenomena yang baru terjadi di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pangkep. Sebagai contoh perkelahian yang terjadi antar kelompok mahasiswa dan kelompok pemuda di lingkungan masyarakat Kabupaten Pangkep. Penyebab perkelahian ini tentunya bermacam-macam dan perkelahian yang biasanya terjadi selalu diikuti dengan kekerasan yang tentunya dapat berdampak negatif baik bagi para pelaku perkelahian maupun lingkungan di sekitarnya.

Perkelahian antar kelompok biasanya sering dilakukan oleh mereka yang usianya masih muda atau remaja. Usia yang masih muda memiliki rasa ingin bebas untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagai pemuas diri,

tetapi kegiatan yang mereka lakukan cenderung kegiatan yang negatif diantaranya untuk mendapat perhatian dari lingkungan masyarakat atau untuk menunjukkan jati diri di lingkungan masyarakat.

Dari uraian diatas penulis berpendapat bahwa permasalahan yang demikian apabila dibiarkan begitu saja maka selain menimbulkan kerugian bagi para pelaku perkelahian, menimbulkan dampak bagi keamanan dan ketentraman masyarakat, juga dapat menimbulkan perpecahan diantara masyarakat. Hal ini tentu tidak sesuai dengan harapan bangsa Indonesia yaitu persatuan Indonesia.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas, maka masih dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut untuk mengetahui lebih jelas sebab dan upaya penanggulangan perkelahian antar kelompok. Hal yang terpenting adalah bagaimana meminimalisir atau mengurangi intensitas permasalahan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan perkelahian antar kelompok di Kabupaten Pangkep?
2. Bagaimanakah upaya yang ditempuh oleh aparat kepolisian dan pemerintah daerah dalam penanggulangan perkelahian antar kelompok yang terjadi di Kabupaten Pangkep?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan-rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab sehingga terjadinya perkelahian antar kelompok di Kabupaten Pangkep.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya perkelahian antar kelompok yang terjadi di Kabupaten Pangkep.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

- a. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi para akademisi khususnya dalam bidang hukum.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa konsep, metode, atau teori dalam studi ilmu hukum khususnya yang menyangkut penegakan hukum pidana dalam kaitannya dengan penegakan hukum terhadap maslah perkelahian antar kelompok.
- c. Dapat menambah wawasan penulis dalam ilmu hukum pidana khususnya dalam bidang ilmu kriminologi dan kasus pencegahan perkelahian atau konflik kekerasan yang terjadi dalam masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kriminologi**

##### **1. Pengertian Kriminologi**

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis. Secara harfiah kriminologi berasal dari kata "*crime*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat (Topo Santoso, 2014:9).

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19 yang lampau sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lombroso (1876) mengenai teori tentang atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan sebab-akibat bersama-sama dengan Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari masyarakat (Ramli Atmasasmita, 2010:3).

Kriminologi dalam pengertian umum (Muhammad Mustofa, 2013:3) merupakan:

"Kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan. Dalam pengertian umum ini kriminologi merupakan kajian (the study) dengan pendekatan multidisiplin, metode penelitiannya tergantung pada disiplin utamanya. Dalam kaitan ini penjelasan gejala kejahatan tersebut dapat berlandaskan pada berbagai ilmu dasar".



Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Objek penelitian kriminologi diantaranya adalah kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang, reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat dan tingkah laku menyimpang, baik merupakan reaksi formal sebagai bekerjanya pranata-pranata sistem peradilan pidana, maupun reaksi non formal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan.

Kriminologi juga mempelajari tingkah laku menyimpang atau pola tingkah laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai dan norma-norma tersebut tidak hanya yang dirumuskan secara formal dalam hukum atau undang-undang, tetapi juga yang hidup dalam masyarakat walaupun tidak dicantumkan dalam hukum atau undang-undang suatu negara.

Beberapa pendapat ahli memberikan definisi tentang kriminologi (A.S. Alam, 2010:1), diantaranya sebagai berikut:

1. J.Constant : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
2. W.A. Bonger : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
3. WME. Noach : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.
4. Edwin H. Sutherland : Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).
5. Michael dan Adler : Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan

mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

6. Wood : Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat (Topo Santoso, 2014:12).

Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum (Topo Santoso, 2014:11). Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

1. Sosiologi Hukum  
Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
2. Etiologi Kejahatan  
Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
3. Penology  
Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Kriminologi dalam pengertian umum merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan. Dalam pengertian umum ini kriminologi merupakan kajian (the study) dengan pendekatan multidisiplin, metode penelitiannya tergantung pada disiplin utamanya. Dalam kaitan ini penjelasan gejala kejahatan tersebut dapat berlandaskan pada berbagai ilmu dasar (Muhammad Mustofa, 2013:3).

Disamping beberapa pengertian di atas, terdapat pula Kriminologi terapan yang berupa (Topo Santoso, 2014:10) :

1. *Higiene Kriminil*, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
2. Politik Kriminil, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.
3. Kriminalistik (*Policie Scientific*), yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan dari semula kriminologi menyelidiki kausa kejahatan dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat.

Dalam perkembangannya ilmu kriminologi memberikan sumbangan dalam penyusunan perundang-undangan baru (proses kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (etiologi kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan (criminal prevention).

Di samping itu Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai:

“Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya”.

Michael dan Adler berpendapat pula bahwa :

“Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat”.

Wood merumuskan bahwa:

“Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat”

Cakupan studi kriminologi begitu luas dan beragam menyebabkan kriminologi menjadi sebuah kajian yang interdisipliner terhadap kejahatan. tidak hanya menyangkut peristiwa kejahatan, tapi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi dari kejahatan, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang. Kriminologi juga mengkaji upaya pengendalian kejahatan serta mengkaji reaksi terhadap kejahatan baik formal maupun informal, baik reaksi pemerintah maupun reaksi masyarakat secara keseluruhan. (Indah Sri Utari, 2012:1).

Mengenai definisi kriminologi itu sendiri, terdapat berbagai versi yang dirumuskan oleh para ahli kriminologi yang masing-masing memiliki pandangan yang berbeda-beda namun pada hakekatnya hampir sama yaitu mengartikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai objek utamanya, serta bertujuan untuk mengetahui sebab akibat, upaya-upaya, penanggulangan kejahatan dan mencegah timbulnya kejahatan.



## **2. Pembagian Kriminologi**

Kriminologi dapat dibagi menjadi dua golongan (A.S.Alam, 2010:4) yaitu:

### **1. Kriminologi Teoritis**

Secara teoritis kriminologi dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.

- a. Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas seorang penjahat.
- b. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial (A.S.Alam, 2010:4) :
  - 1) Etiologi Sosial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.
  - 2) Geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.
  - 3) Klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.
- c. Psikologi Kriminal, yaitu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa . yang termasuk dalam golongan ini adalah:
  - 1) Tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.
  - 2) Psikologi Sosial Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa.
  - 3) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila.
  - 4) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum (A.S.Alam, 2010:5).

## 2. Kriminologi Praktis

Kriminologi praktis yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula dikatakan bahwa kriminologi praktis merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*).

## 3. Teori-teori Kriminologi

Beberapa teori-teori yang terdapat dalam kriminologi (Romli Atmasasmita, 1992) adalah sebagai berikut:

### A. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association*)

Tingkah laku kriminal di pelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal yang terjadi dalam kelompok yang intim. Mempelajari tingkah laku kriminal termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung pada frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.

Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi karena

tingkah laku non kriminalpun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

#### B. Teori *Anomi*

Perkembangan masyarakat di dunia terutama setelah era depresi besar yang melanda khususnya masyarakat eropa pada tahun 1930-an telah banyak menarik perhatian pakar sosiologis saat ini. Hal ini disebabkan telah terjadi perubahan struktur masyarakat sebagai akibat dari depresi tersebut, yaitu tradisi yang telah menghilang dan telah terjadi “degurasi” di dalam masyarakat. Keadaan inilah yang dinamakan sebagai “anomi” oleh durkheim.

Pakar sosiologi melihat peristiwa tersebut lebih jauh lagi mengambil makna darinya sebagai suatu bukti atau petunjuk bahwa terdapat hubungan erat antara struktur masyarakat dengan penyimpangan tingkah laku individu.

#### C. Teori Kontrol Sosial dan *Containment*

Pengertian teori kontrol sosial merujuk pada pembahasan delekuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara lain: struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Dengan demikian pendekatan kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

#### D. Teori Labeling

Pendekatan teori labeling dapat dibedakan dalam dua bagian:

1. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label.
2. Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.  
Persoalan pertama adalah labeling ini memperlakukan labeling sebagai dependent variabel atau variabel tidak bebas dan keberadaannya memerlukan penjelasan. Labeling dalam arti ini adalah labeling sebagai akibat dari reaksi masyarakat. Persoalan labeling kedua adalah bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena cap atau label. Persoalan ini memperlakukan labeling sebagai variabel yang independen atau variabel bebas/mempengaruhi. Dalam kaitan ini terdapat dua proses bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena cap atau label untuk melakukan penyimpangan tingkah lakunya.

Dua konsep penting dalam teori labeling adalah *primary deviance* dan *secondary deviance*. *Primary deviance* ditujukan kepada perbuatan penyimpangan tingkah laku awal, sedangkan *secondary deviance* adalah berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat. Sekali cap atau status ini dilekatkan pada seseorang, maka sangat sulit orang yang bersangkutan untuk selanjutnya melepaskan dari cap dimaksud dan kemudian akan mengidentifikasikan dirinya dengan cap yang telah diberikan masyarakat terhadap dirinya.

#### E. Teori Paradigma Studi Kejahatan

Pada teori paradigma studi kejahatan menganut paradigma positivis sebagai suatu paradigma kejahatan, positivisme menekankan pada determinisme dimana tingkah laku seseorang adalah akibat dari sebab-



akibat antara individu yang bersangkutan dengan lingkungannya. Penganut paradigma ini secara 'tugas' memisahkan secara mutlak antara ilmuwan (yang akan menelitinya) dengan objek yang akan diteliti, sehingga gejala yang diamati diluar jangkauan subjektivitas peneliti.

Prinsip-prinsip paradigma ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkah laku manusia merupakan hasil dari hukum sebab-akibat.
2. Hubungan sebab-akibat tersebut dapat diungkapkan melalui metode-metode yang bersifat ilmiah.
3. Penjahat mewakili hubungan sebab akibat yang unik.
4. Jika hubungan sebab akibat ini dapat diketahui (melalui metode ilmiah) maka tingkah laku kriminal dapat diprediksi dan dapat diawasi dan penjahat itu dapat di bina, (Romli Atmasasmita, 1992:39).

Adapun Teori-teori dari Perspektif lainnya merupakan suatu alternatif penjelasan terhadap kejahatan yang dengan teori sebelumnya. Penjelasan alternatif ini secara tegas menolak model konsensus tentang kejahatan dalam semua teori sebelumnya. Menurut teori ini kalau perbuatan tidak dianggap sebagai kejahatan oleh hukum maka tidak seorang pun yang melakukan perbuatan itu dapat disebut sebagai seorang penjahat. Teori-teori ini menjelaskan mengenai (Wahju Muljono, 2012:65) :

#### 1. *Labeling Theory*

“Para ahli memandang para kriminal bukan sebagai orang yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang bersifat salah, tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat karena pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat”.

## 2. *Conflict Theory*

“Teori konflik ini lebih menekankan pada pola kejahatan yang ada dan mencoba untuk meneliti mengenai proses pembuatan hukum dan penerapan hukum pidana”. Teori Konflik terdiri dari dua bagian yaitu:

- (1) Teori konflik konservatif : Teori ini beranggapan bahwa konflik muncul di antara kelompok-kelompok yang mencoba untuk menggunakan kontrol atas situasi atau kejadian. Teori ini juga beranggapan bahwa “siapa yang tertinggi dalam struktur kelas sosial maka akan memiliki kekuatan penuh dalam masyarakat”. Dengan demikian mereka yang memiliki kekuasaan akan memengaruhi pembuatan keputusan.

## **B. Kejahatan**

### **1. Pengertian Kejahatan**

Kejahatan menurut istilah tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang tercela oleh masyarakat, misalnya pembunuhan dan pencurian yang dilakukan oleh manusia. Secara formil (menurut hukum) kejahatan adalah suatu perbuatan, yang oleh masyarakat diberi pidana. Dapat dikatakan pula bahwa kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat

menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.

Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*) kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana maka perbuatan itu bukan sebagai kejahatan. Sedangkan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*) kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Maka perbuatan tersebut merupakan kejahatan (A.S. Alam, 2010:16)

Kejahatan menurut hukum pidana (Rena Yulia, 2010:86) adalah:

“Setiap tindakan yang dilakukan melanggar rumusan kaidah hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-unsur delik, sehingga perbuatan tersebut dapat dihukum. Atau perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan tersebut. Sedangkan kejahatan dalam konsep yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana”.

Beberapa pendapat ahli mengenai pengertian kejahatan adalah sebagai berikut:

“Menurut Sahetapy kejahatan mengandung konotasi tertentu merupakan suatu pengertian dan penanaman yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif) yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial”.

“Menurut Arif Gosita, “Kejahatan adalah interaksi, karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi. Kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan dalam arti luas. Artinya tidak saja kejahatan yang dirumuskan dalam undang-undang hukum

pidana saja melainkan juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat. Tidak atau belum dirumuskan dalam undang-undang dikarenakan situasi dan kondisi tertentu”.

Menurut W.J.S. Poerwardarminta (1996:394) :

“Kejahatan yang berasal dari kata dasar jahat berarti “sangat tidak baik, buruk, jelek, atau sifat yang jahat, perbuatan yang jahat seperti pencuri, membunuh, dsb”, jadi perkelahian merupakan bagian dari kejahatan yang pada hakikatnya mengandung dosa. Karena dengan perkelahian tersebut memungkinkan adanya orang yang luka atau terbunuh”.

## **2. Unsusr-unsur Kejahatan**

Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan, ada beberapa unsur yang saling berkaitan yang harus terpenuhi (A.S. Alam, 2010:18).

Unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam pasal 362 KUHP (*asas legalitas*).
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*).
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

## **3. Teori-Teori Sebab Kejahatan**

Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa penderitaan



dalam bentuk hukuman atau tindakan (Rena Yulia, 2010:89). Perbuatan tersebut tentunya dilakukan karena adanya sebab-sebab tertentu, sebab-sebab kejahatan tersebut dapat dilihat dari beberapa teori kriminologi yang mengungkapkan tentang sebab-sebab mengapa kejahatan bisa terjadi.

Teori tersebut diantaranya yaitu teori penyebab kejahatan dari perspektif biologis, perspektif psikologis, dan perspektif sosiologis (A.S. Alam, 2010:35).

#### A. Perspektif Biologis

##### 1. Lahir sebagai penjahat (born criminal),

Teori born criminal dari Cesare Lambroso (1835-1909) lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Lambroso membantah tentang sifat free will yang dimiliki manusia. Doktrin atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia.

Ajaran inti dalam penjelasan awal lambroso tentang kejahatan adalah bahwa (A.S. Alam, 2012:35) :

“Penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal. Lambroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemorosotan yang termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi”.

Berdasarkan penelitiannya Lambroso mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yaitu (A.S. Alam, 2012:36) :

1. *Born Criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme.
2. *Insane Criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perbuatan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah.
3. *Occasional Criminal*, atau Criminaloid, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.
4. *Criminal of Passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

## 2. Tipe Fisik

### A. Ernest Kretchmer

Dari hasil Penelitian Kretchmer terhadap 260 orang gila di Jerman (A.S. Alam, 2010:37) Kretchmer mengidentifikasi keempat tipe fisik yaitu:

- a. Asthenic : kurus, bertubuh ramping, berbahu kecil yang berhubungan dengan schizophrenia (gila).
- b. Athletic : menengah tinggi, kuat, berotot, bertulang kasar.
- c. Pyknic : tinggi sedang, figur yang tegap, leher besar, wajah luas yang berhubungan dengan depresi.
- d. Tipe campuran yang tidak terklasifikasi.

### B. William H. Sheldon

Sheldon berpendapat bahwa ada korelasi yang tinggi antara fisik dan tempamen. Sheldon (A.S. Alam, 2010:37) memformulasikan sendiri kelompok *somatotypes*, yaitu :

1. The endomorph (tubuh gemuk).
2. The mesomorph (berotot dan bertubuh atletis).
3. The ectomorph (tinggi, kurus, fisik yang rapuh).

Menurut Shaldon, Orang yang didominasi sifat bawaan mesomorph cenderung lebih dari orang lainnya untuk terlibat dalam perilaku ilegal. Dengan mengandalkan pada pengujian fisik dan psikologis, Sheldon menghasilkan suatu 'Index to delinquency' yang dapat digunakan untuk memberi profil dari tiap problem pria secara mudah dan cepat.

#### C. Shledon Glueck dan Eleanor Glueck

Shledon Glueck dan Eleanor Glueck melakukan studi komporatif antara pria delinquent dengan non delinquent. Pria delinquent didapati memiliki wajah yang lebih sempit, dada yang lebih besar, pinggang yang lebih besar lengan bawah dan lengan atas lebih besar dibandingkan dengan non delinquent

#### 3. Disfungsi Otak dan (*Learning Disabilities*), (A.S. Alam, 2012:38)

Disfungsi otak dan cacat neurologist secara umum ditemukan pada mereka yang menggunakan kekerasan sacara berlebihan dibanding orang pada umumnya. Banyak pelaku kejahatan kekerasan kelihatannya memiliki cacat di dalam otaknya dan berhubungan dengan terganggunya *self-control*.

#### 4. Faktor Genetik (A.S. Alam, 2012:39)

##### A. Twins Studies

Karl Cristiansen dan sanolf A. Mednick melakukan suatu studi terhadap 3.586 pasangan kembar di suatu kawasan Denmark yang

dikaitkan dengan kejahatan serius. Mereka menemukan bahwa pada identical twins (kembar yang dihasilkan dalam satu telur yang dibuahi membela menjadi dua embrio) jika pasangannya melakukan kejahatan, maka 50% pasangannya juga melakukan. Sedangkan pada fraternal twins (kembar yang dihasilkan dari dua telur yang terpisah, keduanya dibuahi pada saat yang bersamaan, angka tersebut hanya 20%. Hasil dari temuan ini mendukung hipotesis bahwa genetika meningkatkan resiko kriminalitas.

#### B. Adoption Studies

Studi tentang adopsi ini dilakukan terhadap 14.427 anak yang diadopsi di Denmark menemukan data (A.S. Alam, 2010:39) :

- a) Dari anak-anak yang orang tua angkat dan orang tua aslinya tidak tersangkut kejahatan, 13,5% terbukti melakukan kejahatan.
- b) Dari anak-anak yang memiliki orang tua angkat kriminal, tapi orang tua aslinya tidak, 14,7% terbukti melakukan kejahatan.
- c) Dari anak-anak yang orang tua angkatnya tidak kriminal, tetapi memiliki orang tua asli kriminal, 20% terbukti melakukan kejahatan.
- d) Dari anak-anak yang orang tua angkat dan orang tua aslinya kriminal, 24,5% terbukti melakukan kejahatan.

Dari hasil temuan tersebut sangat mendukung bahwa kriminalitas dari orang tua asli (orang tua biologis) memiliki pengaruh lebih besar terhadap anak dibanding kriminalitas dari orang tua angkat.

### C. The XYY Syndrome (A.S. Alam, 2012:39)

Setiap orang memiliki 23 pasang kromosom yang diwariskan. Satu pasangan kromosom menentukan gender (jenis kelamin). Seorang perempuan mendapat satu X kromosom dari ayah dan ibunya. Seorang laki-laki mendapat satu kromosom dari ibunya dan satu Y kromosom ayahnya. Mereka yang memiliki kromosom XYY cenderung bertubuh tinggi, secara fisik agresif, dan sering melakukan kekerasan.

### B. Perspektif Psikologis

#### 1. Teori Psikoanalisis

Teori psikoanalisis ini menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu “consience” (hati nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi.

Ada 3 prinsip dasar psikologis yang mempelajari kejahatan yaitu (A.S. Alam, 2010:40) :

- 1) Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- 2) Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan.
- 3) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

## 2. Kekacauan Mental (*Mental Disorder*), (A.S. Alam, 2012:41)

Kekacauan disorder yang sebagian besar dialami oleh penghuni lembaga pemasyarakatan, oleh Philipe Pinel seorang dokter Perancis sebagai manie sans delire. Pada dewasa ini penyakit mental tadi disebut dibuat antisocial personality atau psychopathy sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah.

Pencarian personality traits (sifat kepribadian) telah dimulai dengan mencoba menjelaskan kecakapan mental secara biologis. Feeble-mindedness (lemah pikiran), insanity (penyakit jiwa), dan stupidity (kebodohan) dianggap diwariskan.

## 3. Pengembangan Moral (*Development Theory*), (A.S. Alam, 2012:42)

Lawrence Kohlberg menemukan bahwa Pemikiran moral tumbuh dalam tahap pre-conventional stage atau tahap pra-konvensional, dimana aturan moral dan nilai-nilai moral terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Psikolog John Bowlb mempelajari kebutuhan akan kehangatan dan kasih sayang sejak lahir dan konsekuensinya jika tidak mendapat hal itu. Menurutnya, orang yang sudah biasa menjadi penjahat umumnya memiliki ketidakmampuan membentuk ikatan kasih sayang”.

Kriminologi juga menguji pengaruh ketidakhadiran seorang ibu, baik karena kematian, perceraian, atau ditinggalkan. Penemuan empiris masih

samar dalam soal ini, namun Joan McCord melakukan studi terhadap 201 orang dan menyimpulkan bahwa variabel kasih sayang serta pengawasan ibu yang kurang cukup, konflik orang tua, kurangnya percaya diri sang ibu, kekerasan ayah secara signifikan mempunyai hubungan dengan dilakukannya kejahatan terhadap orang dan atau harta kekayaan. Ketidakhadiran sang ayah tidak dengan sendirinya berkorelasi dengan tingkah laku kriminal.

#### 4. Pembelajaran Sosial (*social learning theory*), (A.S. Alam, 2012:43)

Teori pembelajaran sosial berpendirian bahwa perilaku delinquent dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua perilaku non-delinquent. Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat atau diberi ganjaran, dan tidak dipelajari jika ia tidak diperkuat. Ada beberapa cara mempelajari tingkah laku diantaranya :

##### 1. Observational Learning

Tokoh utama dalam teori ini adalah Albert Bandura berpendapat bahwa individu-individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui behavioral modeling. Anak belajar bagaimana bertingkah laku secara diteransmisikan. Jadi, observational learning (belajar melalui pengamatan) satu lingkaran kekerasan mungkin telah dialirkan secara terus-menerus melalui generasi ke generasi.



## 2. Direct Experience

Patterson dan kawan-kawannya menguji bagaimana agresi dipelajari melalui pengalaman langsung. Mereka melihat bahwa anak-anak bermain secara pasif sering menjadi korban anak-anak lainnya. Namun kadang anak tersebut berhasil mengatasi serangan itu dengan agresi balasan.

## 3. Differential Association Reinforcement

Menggabungkan antara teori learning dari bandura dengan teori differential itu sendiri, Burgess dan Akers berpendapat bahwa teori ini berlangsung terus dengan tingkah laku kriminal tergantung apakah ia diberi penghargaan atau hukuman. Penghargaan atau hukuman yang berarti adalah yang diberikan oleh kelompok yang sangat penting dalam kehidupan si individu. Misalnya kelompok bermain (peer group), keluarga, guru, dan seterusnya. Jika tingkah laku kriminal mendatangkan hasil positif atau penghargaan, maka ia akan terus bertahan.

## C. Perspektif Sosiologis

Teori sosiologis ini yaitu mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu:

### 1. *Anomie* (ketiadaan norma) atau *Strain* (ketegangan)

Teori ini beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi.

### 2. Teori *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya)

Teori penyimpangan budaya ini lebih memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini juga memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class*. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat.

### 3. Teori Kontrol Sosial (*Control Social Theory*)

Teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.

Dari beberapa penjelasan teori-teori penyebab kejahatan diatas, dapat dikatakan bahwa teori-teori dari perspektif biologis dan psikologis tersebut sama-sama memiliki pandangan bahwa tingkah laku kriminal

disebabkan oleh beberapa kondisi fisik dan mental yang mendasari dan memisahkan penjahat dan bukan penjahat. Sedangkan teori-teori perspektif sosiologis lebih kepada mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial.

Salah satu teori sosial yang cukup dominan sebagai penyebab kejahatan adalah teori fasilitas dari Bonger. Bonger berpendapat bahwa (A.S. Alam, 2010:15) :

“Untuk terjadinya kejahatan harus ada niat dan kesempatan (fasilitas yang disediakan lingkungan). Teori ini dikembangkan oleh kepolisian menjadi teori NKK, Niat + Kesempatan maka terjadi kejahatan”.

Teori NKK ini merupakan teori-teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan didalam masyarakat. Teori ini sering digunakan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat.

Rumus teori ini adalah :

$$A + K1 = K2$$

Keterangan:

N = Niat

K1 = Kesempatan

K2 = Kejahatan

Dari beberapa teori yang telah diuraikan diatas, penulis berpendapat bahwa ketiga teori tersebut lebih menekankan kepada tingkatan status

sosial dan nilai-nilai atau norma-norma yang hidup di masyarakat, dalam hal ini sebagai sebab terjadinya kejahatan

#### **4. Kejahatan Dengan Kekerasan**

Menurut para ahli, kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu hal tersebut merupakan kejahatan (Romli Atmasasmita, 2010:66).

Berdasarkan definisi di atas, tampak bahwa kekerasan (*Violence*) merujuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda, fisik, atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Definisi tersebut sangat luas sekali karena menyangkut pula perbuatan “mengancam” disamping suatu tindakan nyata.

Adapun pendapat para ahli pada hakikatnya menekankan bahwa tidak semua kekerasan merupakan kejahatan, karena ia bergantung pada apa yang merupakan tujuan dari kekerasan itu sendiri dan bergantung pula pada persepsi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, apakah kelompok berdasarkan ras, agama, dan ideologi (Romli Atmasasmita, 2010:64)

Masalah kejahatan tentunya sangat mengganggu keamanan dan ketertertiban masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Masalah

kejahatan sudah ada sejak zaman purba dan akan selalu ada bersama dengan kehadiran manusia. Kejahatan tersebut bukan berarti didiamkan begitu saja, tetapi perlu usaha bersama untuk menanggulangnya (Wahju Muljono, 2012:77).

Ada empat jenis kekerasan (Jamil Salmi, 2003:31) yakni :

#### 1. Kekerasan Langsung

Kekerasan langsung mengacu pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologis seseorang secara langsung. Hal yang termasuk dalam kategori ini adalah semua bentuk pembunuhan (*homicide*), seperti pemusnahan etnis, kejahatan perang, pembunuhan massal, dan juga semua bentuk tindakan paksa atau brutal yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikologis seseorang (pengusiran paksa terhadap suatu masyarakat, penculikan, penyiksaan, pemerkosaan dan penganiayaan).

#### 2. Kekerasan Tak Langsung

Kekerasan tak langsung adalah yang membahayakan manusia, bahkan kadang-kadang sampai membunuh, namun tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dan pihak (orang, masyarakat, atau institusi) yang bertanggung jawab atas tindak kekerasan tersebut. Disini terdapat dua sub kategori yang perlu dibedakan, yakni kekerasan karena kelalaian dan kekerasan perantara.

### 3. Kekerasan represif

Kekerasan represif berkaitan dengan pencabutan hak-hak dasar selain hak untuk hidup dan hak untuk dilindungi dari kecelakaan. Oleh karena itu, didalamnya termasuk pelanggaran hak-hak asasi manusia, meskipun secara langsung atau tidak langsung membahayakan kehidupan manusia. Kekerasan represif terkait dengan tiga hak dasar, yaitu hak sipil, hak politik dan sosial.

### 4. Kekerasan Alternatif

Kekerasan alternatif merujuk pada pencabutan hak-hak individu yang lebih tinggi, misalnya hak perkembangan emosional, budaya intelektual. Pentingnya mendefinisikan dan memasukkan hak-hak manusia yang demikian ke dalam jenis kekerasan alternatif ini adalah untuk menegaskan bahwa keberadaan manusia membutuhkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan non materi.

## 5. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan empirik, meliputi tiga bagian pokok yaitu (A.S. Alam, 2010:79) :

### 1. *Pre-Emtif*

Pre-emptif yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah

menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

## *2. Preventif*

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

R. Soesilo (1976:95) menulis usaha-usaha pencegahan kejahatan yang bersifat preventif (sebelum tindak pidana terjadi), yakni :

- a. Mengadakan usaha-usaha dan tindakan-tindakan untuk mencegah jangan sampai terjadi perbuatan-perbuatan anti sosial oleh anak-anak dengan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok anak-anak itu, misalnya makan, cinta kasih orang tua, dan lain sebagainya.
- b. Keikutsertaan masyarakat untuk berkecimpung dalam usaha menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berupa olahraga, kesenian, rekreasi, dan sebagainya.



- c. Mengadakan perondaan-perondaan ditempat dimana anak-anak berkumpul, rumah perjudian, tempat-tempat penjualan minuman keras dan sebagainya.
- d. Membubarkan dan menyingkirkan anak-anak dari tempat perjudian, miras, dan sebagainya.

### 3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.

Beberapa cara yang ditempuh dalam tindakan represif atau setelah tindak pidana tersebut terjadi antara lain :

1. Menjatuhkan hukuman yang semaksimal mungkin terhadap para pelaku perkelahian tersebut.
2. Memberi upaya penyuluhan hukum, agama, moral dan etika kepada para tahanan dan narapidana.
3. Memberikan pembinaan dan latihan kepada narapidana selama dalam masa tahanan dalam lembaga permasyarakatan dengan sebagai keterampilan yang memberikan kemungkinan terhadap narapidana agar bisa mandiri setelah menjalani masa hukuman.

Dalam upaya pencegahan kejahatan David Bayley (1998:188) menawarkan strategi-strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang harus dilakukan polisi meliputi 4 unsur sebagai berikut:

1. *Consultation* dapat diartikan memperdalam hubungan dan penemuan secara teratur dengan kelompok-kelompok yang ada.
2. *Adaptation* merupakan suatu upaya memahami karakteristik suatu wilayah dengan isinya, baik kejahatan, struktur masyarakat atau sumber daya yang ada.

3. *Mobilitation* merupakan suatu asumsi bahwa pencegahan kejahatan tidak mungkin hanya dilakukan oleh aparat kepolisian. Sedangkan misi pokok dari mobilisasi adalah memberikan kepemimpinan dan dukungan profesional untuk mendorong dan memperbaiki usaha masyarakat guna mengembangkan suatu program kooperatif dan seimbang guna menghadapi tingkah laku menyimpang dan melanggar hukum.
4. *Problem Solving* (solusi permasalahan), sebagai reaksi terhadap kejahatan dan keadaan darurat lain, setelah hal tersebut terjadi, aparat kepolisian mulai mempelajari kondisi-kondisi yang menimbulkan munculnya panggilan layanan pengaduan, menyusun rencana untuk membetulkan kondisi dan mempolopori dalam mengevaluasi dan melaksanakan tindakan-tindakan perbaikan.

Berdasarkan beberapa upaya penanggulangan di atas, penulis berpendapat bahwa upaya tersebut harus dilakukan secara benar dan efektif, agar dapat memperoleh hasil yang baik (dalam hal ini menekan tingkat kejahatan yang terjadi).

## **C. Perkelahian antar Kelompok**

### **1. Pengertian Perkelahian Kelompok**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga (2002:258), pengertian tentang perkelahian yaitu perihal kelahi, dimana kelahi sendiri memiliki arti :

- Adu Kata-kata
- Pertengkaran dengan adu kata-kata dan tenaga.

Sedangkan, Kelompok dalam KBBI Edisi Ketiga (2002:534) berarti :

- Kumpulan
- Golongan
- Gugusan

- Antar kumpulan manusia yang merupakan kesatuan beridentitas dengan adat-istiadat dan sistem norma yang mengatur pola-pola interaksi antar manusia itu.
- Pola kumpulan orang yang memiliki beberapa atribut sama atau hubungan dengan pihak yang sama.

Berdasarkan pengertian dari penjelasan arti kedua kata diatas, penulis berpendapat bahwa perkelahian antar kelompok yaitu kumpulan orang yang terdiri atas dua golongan/kelompok yang saling adu kata-kata maupun adu tenaga maupun suatu proses penyerangan atau bantuan fisik yang mengakibatkan salah satu atau kedua-duanya (yang terlibat) mengalami luka. Kelompok dalam hal ini adalah dua orang atau lebih yang terhimpun dalam satu kelompok.

Yang dimaksud dengan perkelahian menurut pasal 358 KUHP yaitu suatu penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang turut serta dalam perkelahian tersebut. Penyerangan dan perkelahian memiliki perbedaan yakni, penyerangan berarti suatu perkelahian dimana salah satu pihak ada yang memulai, sedangkan perkelahian yaitu suatu perkelahian dimana kedua belah pihak yang terlibat sama-sama saling memulai (M. Sudrajat Bassar, 1983:130)

Perkelahian kelompok merupakan salah satu tingkah laku kolektif berupa tindakan sosial dalam bentuk yang sama yang dilakukan oleh orang banyak dengan kepentingan dan tujuan yang sama sebagai satu kesatuan (Muhammad Mustofa, 2013:225).

Tingkah laku kolektif dengan demikian berbeda dari tingkah laku individual. Dalam tingkah laku kolektif tersebut setiap individu yang terlibat di dalamnya sekadar merupakan salah satu unsur kolektifa.

Karakter dari tingkah laku berkelompok sangat berbeda dari karakter individu yang mendukungnya dalam arti apa yang dilakukan oleh individu ketika melakukan tingkah laku berkelompok tidak sama dengan karakter asli pribadinya.

(A.F Saifuddin, 1986:14) memberikan pengertian menyangkut perkelahian antar kelompok sebagai berikut:

“Pengertian perkelahian didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan didasari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Hal ini disebabkan pihak lawan dianggap sangat penting dalam mencapai tujuan. Hal ini disebabkan karena dalam konflik orientasi ke arah pihak lebih penting daripada objek, yang hendak dicapai dalam kenyataan, karena berkembangnya rasa kebencian yang makin mendalam, maka pencapaian tujuan seringkali sekunder sedangkan pihak lawan yang dihadapi jauh lebih penting”.

## **2. Perkelahian Kelompok Sebagai Suatu Kejahatan**

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai segi yang berbeda. Menyangkut kejahatan yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai komentar yang berbeda-beda, diantaranya :

Paul Moedikdo Moeliono (J.C.T. Simorangkir dkk, 1987:82) mengemukakan bahwa:

“Kejahatan adalah pelanggaran perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai suatu perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak dapat dibiarkan”

J.M. Van Bemmelen (J.C.T. Simorangkir dkk, 1987:82)

mengemukakan bahwa :

“Kejahatan adalah setiap suatu tindakan anti social yang menimbulkan kerugian, ketidak patutan dalam masyarakat terdapat kegelisahan dan untuk menentramkan masyarakat, Negara harus menjatuhkan pidana kepada penjahat”.

Pernyataan-pernyataan tersebut diatas, memberikan gambaran bahwa perkelahian antar kelompok merupakan perilaku kejahatan. Hal ini diperkuat oleh penemuan mengemukakan bahwa ada beberapa dampak sosial yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari perkelahian kelompok diantaranya (Muslimin, 2001:89-104) :

- 1) Berakibat pada pelaku perkelahian itu sendiri, yang mengalami luka-luka bahkan ada yang mengakibatkan kematian. Disamping itu banyak remaja/pemuda yang terlibat aksi perkelahian antar kelompok mengalami trauma dan tekanan batin yang berkepanjangan baik yang sempat tertangkap maupun yang sempat meloloskan diri dari pihak keamanan.
- 2) Mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti terjadinya pengrusakan fasilitas umum, dan lain-lain.
- 3) Terjadi disintegrasi sosial

Dampak yang dilakukan oleh perkelahian antar kelompok diatas cukup memberi alasan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan

kejahatan atau tindak kriminal yang melanggar norma-norma susila dan norma-norma hukum yang berlaku, akibat perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain baik itu kerugian materil maupun kerugian fisik.

### **3. Ketentuan Pidana Perkelahian Antar Kelompok**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa pasal yang dapat dikenakan kepada pelaku perkelahian kelompok sebagai sanksi pidana, diantaranya yakni :

Pasal 358 KUHP :

“Barangsiapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari pada tanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus, dihukum :

- (1) Penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang mendapat luka berat saja.
- (2) Penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan ada orang mati.

Pasal 170 :

- (1) Barangsiapa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”
- (2) Tersalah dihukum
  1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
  2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
  3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Perkelahian kelompok menurut pasal 358 KUHP dan pasal 170 KUHP tergolong kedalam tindak pidana kejahatan, karena dapat dibuktikan dengan terdapatnya unsur penting dalam perkelahian kelompok sehingga digolongkan sebagai perbuatan pidana. Dalam pasal 358 KUHP tersebut lebih menekankan kepada akibat yang dilakukan oleh mereka yang terlibat ataupun melibatkan diri dalam perkelahian atau penyerangan kelompok. Akibat yang dirumuskan pada pasal 358 ada dua yakni luka parah dan mati, dimana terdapat di salah satu atau kedua belah pihak yang korbannya tersebut menderita luka parah atau mati. Sedangkan Dalam pasal 170 KUHP lebih mengatur tentang sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara terang-terangan di muka umum.

Mereka yang terlibat ataupun melibatkan diri dalam perkelahian atau penyerangan kelompok, selain dapat didakwakan dengan pasal 358 dan pasal 170 KUHP dapat pula dikenakan pasal-pasal mengenai penganiayaan, bilamana di antara mereka tersebut telah diketahui atau dapat dibuktikan sebagai pelaku yang menyebabkan orang lain (lawannya) luka parah atau meninggal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perkelahian dikategorikan sebagai perbuatan jahat karena adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain serta kerugian tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Pangkep tepatnya di Kantor Polres Pangkep dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut penulis dapat memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini.

#### **B. Jenis dan sumber Data**

Jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan obyek kajian seperti literatur-literatur, dokumen, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu :

1. Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan

dan berhubungan langsung dengan obyek penelitian yang dijadikan sebagai landasan teoritis.

2. Metode penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan. Dalam teknik ini cara yang digunakan adalah :

a. Observasi

Pengamatan atau observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan perilaku perkeltahan antar kelompok yang terjadi di Kabupaten Pangkep.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan. Melalui teknik tersebut, maka wawancara akan dilakukan secara langsung terhadap beberapa pihak terkait, baik yang terlibat langsung dengan permasalahan yang diteliti maupun yang tidak terlibat langsung.

#### **D. Analisis Data**

Data-data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dan dianalisa untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kabupaten Pangkep (Pangkajene dan Kepulauan) terletak dipesisir pantai barat Sulawesi Selatan, juga dikenal dengan kekhasan wilayahnya yang tiga dimensi karena secara geografis wilayahnya terdiri dari dua kecamatan di pegunungan, tujuh kecamatan di dataran rendah dan empat kecamatan di kepulauan, dengan luas wilayah keseluruhan 12.362,73 km<sup>2</sup> berjarak 51 km sebelah utara kota Makassar ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Pangkep yang membentang dari garis pantai barat ke timur terdiri dari persawahan, rawa-rawa dan tambak, sedangkan daerah pegunungan dengan ketinggian 100-1000 meter di atas permukaan laut terletak di sebelah timur batu cadas dan sebagian mengandung batu bara serta berbagai jenis batu marmer. Kabupaten Pangkep terdiri dari 13 kecamatan, 9 kecamatan terletak di daratan dan 4 kecamatan terletak di kepulauan, yaitu :

1. Kecamatan Pangkajene
2. Kecamatan Balocci
3. Kecamatan Bungoro
4. Kecamatan Labakkang
5. Kecamatan Ma'rang
6. Kecamatan Segeri

7. Kecamatan Minasatene
8. Kecamatan Tondong Tallasa
9. Kecamatan Mandalle
10. Kecamatan Liukang Tangaya
11. Kecamatan Liukang Kalmas
12. Kecamatan Liukang Tupabbiring
13. Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara.

Secara geografis Kabupaten Pangkep (Pangkajene dan Kepulauan) terletak antara  $110^0$  BT dan  $4^0.40'$  LS sampai dengan  $8^0.00'$  LS atau terletak di Pantai Barat Sulawesi Selatan dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Madura, Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone.

Kabupaten Pangkep memiliki potensi perikanan darat dan laut khususnya tambak udang dan bandeng. Selain potensi pada sektor perikanan juga berpotensi pada sektor industri. Pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Pangkep sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten pangkep.

Untuk menciptakan pemerintahan yang maju dan berkembang membutuhkan Sumber Daya Alam (SDA) yang memadai serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yang harus di dukung oleh lingkungan yang aman dan tertib. Kondisi lingkungan yang tidak aman dan tertib dapat membuat potensi SDA dan SDM tersebut di atas tidak berarti. Suatu kondisi yang kondusif akan menciptakan kenyamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan, sehingga program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik sesuai harapan masyarakat.

#### **B. Data Perkelahian Antar Kelompok di Kabupaten Pangkep**

Dalam usaha untuk mengetahui apakah suatu kejahatan mengalami peningkatan atau penurunan, maka penulis melakukan penelitian pada kantor Kepolisian Resort Kabupaten Pangkep dengan merangkum data kejahatan khususnya perkelahian antar kelompok baik dalam bentuk pengeroyokan, bentuk lain seperti tawuran yang dilakukan secara bersama-sama dalam kurun tahun 2012-2014. hal tersebut dipilih oleh penulis sebagai lokasi penelitian sebagaimana diketahui bahwa pihak kepolisian merupakan instansi pertama tempat melaporkan suatu tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat.

Untuk mengetahui jumlah perkelahian antar kelompok yang terjadi di wilayah Kabupaten Pangkep berdasarkan data yang tercatat di kepolisian, penulis akan menguraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 1 : Jumlah Perkelahian Antar Kelompok (Studi Kasus di Kabupaten Pangkep Tahun 2012-2014)**

No	Tahun	Jumlah Kasus
		Perkelahian Antar Kelompok
1	2012	7
2	2013	6
3	2014	10
Jumlah		23

**Sumber :** *Data Kantor Polres Pangkep*

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kasus perkelahian antar kelompok yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2012-2014 terjadi penurunan dan peningkatan dengan rincian sebagai berikut: pada tahun 2012 tercatat sebanyak 7 kasus perkelahian antar kelompok, pada tahun 2013 jumlah kasus perkelahian antar kelompok menurun yaitu sebanyak 6 kasus dibanding tahun 2012, dan kembali meningkat pada tahun 2014 sebanyak 10 kasus perkelahian antar kelompok. Dari jumlah keseluruhan dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 kasus perkelahian antar kelompok berjumlah 23 kasus. Berdasarkan data tersebut penulis berpendapat bahwa perkelahian antar kelompok yang terjadi di wilayah kabupaten pangkep dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 belum mengalami penurunan secara signifikan, hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2013 yang mengalami penurunan tidak begitu banyak dan kembali meningkat di tahun 2014. Penulis berpendapat bahwa hal tersebut di atas

cenderung akan selalu meningkat apabila tidak dilakukan upaya-upaya pencegahan dengan serius. Maka, hal ini harus menjadi perhatian bagi pihak kepolisian maupun pemerintah setempat untuk melakukan upaya-upaya antisipasi dan pembinaan agar perkelahian antar kelompok dapat diminimalisir dan tidak terus berkembang.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 20 Januari 2015 kepada Brigpol Adi Saputro “Pada umumnya perkelahian yang sering terjadi dilakukan oleh kaum laki-laki dan mayoritas adalah anak muda yang berkelompok-kelompok untuk menunjukkan jati diri”

Untuk mengetahui lebih jelasnya, berikut akan diuraikan data mengenai umur pelaku dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 2 : Data Kelompok Umur Pelaku Perkelahian Antar Kelompok (Studi Kasus di Kabupaten Pangkep Tahun 2012-2014)**

No	Kelompok Umur	Tahun			Jumlah
		2012	2013	2014	
1	15-20 Tahun	8	7	7	22
2	21-25 Tahun	4	3	5	12
3	26-30 Tahun	2	2	6	10
4	31-35 Tahun	2	1	1	4
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>48</b>

**Sumber Data:** Kantor Polres Pangkep

Pada tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa, pelaku kejahatan dalam perkelahian antar kelompok yang terjadi di Kabupaten Pangkep dalam kurun waktu 2012-2014 di dominasi oleh pelaku yang memiliki kisaran



umur antara 15-20 tahun yang berjumlah sebanyak 22 orang, kemudian pada kisaran umur 21-25 tahun berjumlah 12 orang, pada umur 26-30 tahun berjumlah 10 orang dan pada kisaran umur 31-35 tahun jumlahnya semakin berkurang yaitu berjumlah 6 orang.

Dari data tabel diatas yang menunjukkan data umur pelaku, dapat kita lihat bahwa kelompok umur yang cenderung lebih sering melakukan kejahatan dalam hal ini perkelahian antar kelompok adalah mereka yang memiliki umur masih sangat muda, yakni mereka yang berumur antara 15-20 tahun dengan mereka yang berumur 21-25 tahun.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku yang cenderung melakukan kejahatan adalah mereka yang memiliki usia relatif masih muda. Penulis berpendapat bahwa, hal ini disebabkan karena pada kelompok umur yang relatif masih muda belum memiliki kondisi emosional yang stabil dan pengetahuan tentang hukum yang masih kurang.

Pada perkelahian antar kelompok, kekerasan biasanya merupakan pelengkap dari perkelahian. Dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan yang dilakukan terhadap orang dalam aksi perkelahian yaitu dapat menimbulkan luka ringan, luka berat, dan kematian. Berikut akan diuraikan data mengenai dampak yang diakibatkan tersebut dalam bentuk tabel:

**Tabel 3 :Dampak yang ditimbulkan Akibat Perkelahian Antar Kelompok (Studi Kasus di Kabupaten Pangkep Tahun 2012-2014)**

No	Tahun	Dampak Yang Ditimbulkan			Jumlah
		Luka Ringan	Luka Berat	Kematian	
1	2012	7	1	-	8
2	2013	5	1	-	6
3	2014	11	1	-	12
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>26</b>

**Sumber :** *Data Kantor Polres Pangkep*

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa berdasarkan jumlah luka fisik yang ditimbulkan akibat perkelahian antar kelompok dalam kurun waktu tahun 2012 -2014 dapat dirincikan sebagai berikut:

Pada tahun 2012 tercatat sebanyak 7 orang mengalami luka ringan dan 1 orang mengalami luka berat, pada tahun 2013 sebanyak 5 orang mengalami luka ringan dan 1 orang mengalami luka berat dan pada tahun 2014 meningkat sebanyak 9 orang yang mengalami luka ringan dan 1 orang mengalami luka berat. Berdasarkan tabel di atas, dalam kurun waktu 2012-2014 belum tercatat adanya korban yang mengalami kematian, dan jumlah korban yang mengalami luka ringan meningkat dari tahun 2013 ke tahun 2014.

### **C. Faktor-Faktor Penyebab Perkelahian Antar Kelompok**

Dalam perkelahian antar kelompok yang saat ini sering terjadi, datang dari individu yang awalnya ingin menunjukkan solidaritas terhadap kelompoknya dengan mengambil bagian pada aksi-aksi yang pada akhirnya melibatkan kelompok yang secara beramai-ramai saling menyerang kelompok satu dengan lainnya. Ini adalah wujud dari salah satu kenakalan remaja yang berkembang, meluas menjadi kekerasan saling menyerang dan pada kondisi tertentu membuat masyarakat menjadi resah, ketakutan, merasa terganggu lingkungannya. Aksi-aksi inilah yang menjadi cermin perilaku kelompok remaja saat ini yang perlu mendapatkan perhatian.

Hal tersebut yang harus diketahui adalah faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan tersebut sehingga dari faktor-faktor penyebab yang telah diketahui maka dapat dilakukan upaya-upaya pencegahan atau penanggulangan terhadap kejahatan tersebut khususnya dalam hal ini kejahatan yang dilakukan dalam perkelahian antar kelompok.

Adapun faktor-faktor penyebab perkelahian yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini Kepolisian Resort Kabupaten Pangkep dan beberapa pelaku yang terlibat langsung dalam perkelahian, yaitu :

## 1. Faktor Internal

Faktor internal bersumber dari dalam diri individu itu sendiri yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menyelesaikan permasalahan disekitarnya. Pelaku perkelahian biasanya tidak mampu melakukan adaptasi dengan lingkungan yang kompleks, misalnya tidak dapat menyesuaikan diri dengan keanekaragaman pandangan, ekonomi, budaya, dan berbagai keberagaman lainnya yang semakin lama semakin bermacam-macam. Para pelaku perkelahian yang memiliki usia yang relatif masih muda memiliki ketidakstabilan emosi sehingga sulit untuk mengendalikan diri dan tidak peka terhadap orang-orang yang ada disekitarnya. Ketidakmampuan beradaptasi dengan keanekaragaman yang ada di lingkungan sekitar mendorong mereka untuk melakukan tingkah laku yang negatif misalnya, melakukan kekerasan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma yang dengan emosional diwujudkan dalam bentuk perkelahian antar kelompok.

Memiliki sifat emosional sehingga mudah tersinggung akibat terlalu merendahkan diri juga merupakan faktor pendorong untuk melakukan perkelahian. Hal tersebut salah satunya dapat ditandai dengan tindakan seseorang yang sering berprasangka buruk terhadap orang lain atau selalu menganggap dirinya tersisih di lingkungan masyarakat yang berujung pada kehilangan tanggung jawab sosial.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap AS, menerangkan bahwa:

Saya tidak setuju dengan adanya kelompok mahasiswa yang berunjuk rasa menolak kedatangan artis trio macan dalam rangka HUT Kabupaten Pangkep, padahal masyarakat sangat senang dan merasa terhibur apabila kedatangan artis, oleh sebab itu saya dan teman lainnya melawan aksi tersebut.

Hal tersebut telah menunjukkan bahwa faktor internal, dalam hal ini faktor dari individu itu sendiri mempengaruhi seseorang melakukan perbuatan yang menyimpang misalnya, tidak dapat menyesuaikan diri dengan keanekaragaman pandangan. Hal tersebut terlihat dari perlawanan yang dilakukan kelompok pemuda tersebut.

## 2. Faktor Eksternal

### a. Faktor Lingkungan

Faktor Lingkungan keluarga merupakan tempat dimana seseorang pertama kali melaksanakan proses sosialisasi. Perhatian dan kasih sayang dari orang tua merupakan hal sangat penting dan dibutuhkan oleh seorang anak dalam lingkungan keluarga. Suasana dalam keluarga yang harmonis akan membuat anak betah untuk tinggal di rumah sedangkan apabila suasana dalam keluarga yang tidak harmonis dan penuh dengan tekanan atau kekerasan maka dapat menimbulkan rasa tidak aman dan tidak menyenangkan, serta dapat menimbulkan bahaya psikologis bagi anak. Kurangnya perhatian,

kasih sayang dan pengawasan dari orang tua membuat anak bebas melakukan aksi-aksi yang diinginkannya.

Pada dasarnya setiap orang menginginkan pengakuan, perhatian, pujian dan kasih sayang dari lingkungannya, khususnya dari orang tua atau keluarganya, karena secara alamiah orang tua dan keluarga memiliki ikatan emosi yang sangat kuat. Pada saat pengakuan, perhatian, dan kasih sayang tersebut tidak mereka dapatkan di rumah, maka hal itulah yang membuat mereka akan mencarinya di luar rumah. Mereka yang kurang mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan pengawasan dari orang tua cenderung akan melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif sebagai salah satu cara untuk mendapatkan eksistensinya.

Berdasarkan wawancara terhadap Iptu Abdul Kadir T, SH, menerangkan bahwa :

Faktor lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan tempat bergaul merupakan faktor yang sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan tingkah laku menyimpang, terutama mereka yang masih remaja yang dimana pada masa tersebut sulit untuk mengendalikan diri karena belum mempunyai kematangan emosional sehingga sangat mudah terpengaruh oleh perilaku teman-teman di sekitarnya.

Uraian di atas sesuai dengan apa yang dikatakan WN dalam wawancara yang dilakukan penulis. WN menerangkan bahwa, saya melihat banyak teman saya yang ikut melakukan perlawananani terhadap aksi yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa, oleh karena itu saya juga ikut bersama teman saya.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa faktor lingkungan sangat mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan karakter dan mempengaruhi perkembangan jiwa seseorang.

#### b. Faktor Solidaritas

Pada diri remaja terjadi pemaknaan yang sangat sempit terhadap perhimpunan-perhimpunan yang disebutnya dengan kelompok-kelompok. Pembentukan kelompok-kelompok remaja yang tidak di motivasi oleh tuntutan asas-asas kemanfaatan dan tujuan yang baik, hanya akan menumbuhkan solidaritas dan fanatisme sempit yang akan menghantarkan anggotanya ke arah yang sesat dan sulit untuk dipertanggungjawabkan dengan kata lain tidak memiliki dimensi manajemen, dimensi sosial, ekonomi dan yuridis.

Dalam hasil wawancara BD menerangkan bahwa, saya ikut terlibat karena ingin mendukung teman saya untuk melawan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa

Uraian hasil wawancara di atas terkait dengan solidaritas dan fanatisme yang kuat dalam satu kelompok. Hal tersebut menunjukkan bahwa solidaritas dalam kelompok memiliki kekuatan yang kuat dalam mempengaruhi pikiran-pikiran dan tingkah laku anggota kelompok yang ada di dalamnya.

### c. Faktor Minuman Keras

Pengaruh minuman keras akan mempengaruhi fungsi kerja otak. Orang yang sering minum-minuman keras secara berlebihan akan mempengaruhi syaraf berfikir atau melahirkan suatu kepribadian yang menyimpang. Mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan dapat menimbulkan efek samping diantaranya adalah seseorang dapat bertindak diluar pemikiran yang normal, seseorang dapat melakukan kejahatan tanpa disadari apakah tindakan yang dilakukannya benar atau salah, orang tersebut sangat mudah tersinggung, dapat melakukan tindakan-tindakan yang liar dan agresif karena mereka yang meminum minuman keras secara berlebihan cenderung tidak memiliki kesadaran dalam bertindak.

Dari hasil wawancara penulis dengan Brigpol Adi Saputro menerangkan bahwa:

Minuman Keras atau minuman beralkohol cenderung lebih banyak di konsumsi oleh mereka yang lingkungan tempat tinggalnya berada di daerah kumuh. Mengkonsumsi minuman keras juga, selain menimbulkan dampak bagi lingkungan masyarakat juga dapat mengganggu stabilitas masyarakat dan mengganggu kesehatan diri sendiri.

Dari uraian di atas, penulis berpendapat bahwa pengaruh minuman keras sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu kejahatan, karena mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan sangat mempengaruhi kestabilan seseorang dalam bertindak.



#### d. Faktor Pendidikan

Pendidikan mempunyai peran yang sangat besar dalam rangka pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Pangkep. Hal ini dimaksudkan agar kelak dapat menjawab tantangan Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup strategis yang dimiliki Kabupaten Pangkep tiga dimensi.

Hal ini sudah terlihat dari kebijakan prioritas pembangunan pemerintah lima tahun terakhir. Peningkatan kualitas SDM yang salah satunya diperoleh dari kualitas pendidikan akan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap hidup dan pola berfikir dalam menghadapi perubahan peradaban yang sangat cepat terutama di kalangan remaja/ anak muda yang ada di Kabupaten Pangkep agar tidak terjebak perilaku dengan wawasan picik dan sempit atau tidak memiliki pandangan positif ke depan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wilayah penelitian penulis, presentase tingkat pendidikan masih sangat kurang diantaranya, masih banyak yang tidak meneruskan jenjang pendidikan sampai ke perguruan tinggi. bahkan ada juga yang tidak melanjutkan pendidikannya setelah tamat dari bangku sekolah dasar.

Faktor pendidikan merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Rendahnya latar belakang

pendidikan seseorang akan mempengaruhi cara berperilaku seseorang tersebut, diakibatkan kurangnya pengetahuan terutama pendidikan moral, agama, dan kesadaran hukum.

#### **D. Upaya-upaya Kepolisian dan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Perkelahian Antar Kelompok di Kabupaten Pangkep.**

Usaha penanggulangan suatu kejahatan, apakah itu menyangkut kepentingan hukum perorangan, masyarakat maupun kepentingan hukum negara, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan, karena pada dasarnya kejahatan tidak mungkin dapat dihilangkan. Tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada di permukaan bumi ini, Tindak Kejahatan akan hadir di berbagai bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Sifat kejahatan sangatlah kompleks, karena tingkah laku dari penjahat juga bervariasi bentuknya dan masalah kejahatan akan selalu mengikuti dan menyertai peradaban sesuai dengan perkembangan zaman.

Terkait dengan tugas pokok POLRI yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum dan sebagai pengayom masyarakat maka masalah kejahatan merupakan salah satu tanggung jawab penting yang harus diemban oleh pihak kepolisian. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya-upaya untuk dapat

mencegah masalah kejahatan yang sering muncul di kehidupan masyarakat.

Terkait hal tersebut di atas, berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Iptu Abdul Kadir T, SH selaku Kaur Bin Ops sat Reskrim menjelaskan bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan khususnya perkelahian antar kelompok yang terjadi di wilayah hukum Polres Pangkep adalah sebagai berikut :

#### 1. Upaya penanggulangan secara Pre-emptif

Upaya penanggulangan secara pre-emptif merupakan upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini yang dilakukan oleh kepolisian yang mana tindakan itu bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada masyarakat agar dapat mentaati setiap norma-norma yang berlaku. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu Sosialisasi atau penyuluhan mengenai pentingnya keamanan dan ketertiban serta kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya generasi muda demi menciptakan keteraturan dalam masyarakat dan Mendukung kegiatan-kegiatan yang positif yang dilakukan oleh generasi muda.

#### 2. Upaya Penanggulangan secara Preventif

Upaya penanggulangan preventif ini merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan

dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang di tengah masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian diantaranya yaitu :

- a. Mengadakan patroli yang dilaksanakan menyeluruh oleh masing-masing anggota kepolisian baik oleh anggota satuan tertentu maupun beberapa personil tertentu yang memang bertanggung jawab terhadap satu wilayah yang telah di tugaskan. melalui kegiatan patroli tersebut diharapkan pihak kepolisian menjadi lebih dekat dengan masyarakat dalam memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat.
- b. Memberikan sistem penanganan serta pengawasan khusus terhadap daerah yang rawan terjadinya kejahatan.
- c. Melakukan razia, razia tersebut dilakukan di tempat-tempat yang tertentu seperti, razia ke tempat-tempat yang menjual minum-minuman beralkohol secara illegal, razia pelajar, di sekolah-sekolah, razia terhadap premanisme-premanisme, razia terhadap obat-obatan serta barang lainnya yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

- d. Menjalin hubungan kerjasama yang baik terhadap babinsa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kepada pihak-pihak sekolah untuk kalangan pelajar.

### 3. Upaya Penanggulangan Represif

Upaya penanggulangan represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan dan kekerasan, dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali.

Adapun upaya penanggulangan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian berupa tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan.
- b. Memberikan pembinaan yang serius dengan cara membuka kesadaran berfikir dan bertindak para pelaku kejahatan agar kembali ke jalan yang benar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

wawancara yang dilakukan penulis kepada Iptu Abdul Kadir T, SH menerangkan bahwa:

Apabila pelaku perkelahian tersebut adalah anak. Dalam hal ini yang disebut anak berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Maka dari hal tersebut di atas dapat dilakukan diversi dengan memanggil kedua

orang tua pelaku serta dengan syarat bahwa para pelaku tersebut berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Ridwan Saenong,SH.,MH. selaku Kasat Reskrim menjelaskan bahwa dalam melakukan upaya-upaya penanggulangan tersebut pihak kepolisian masih memiliki beberapa kendala yaitu masih kurangnya personil kepolisian di wilayah Polres Pangkep, perbandingan aparat kepolisian dengan jumlah penduduk di Kabupaten Pangkep sangat berbeda jauh sehingga masih banyak kejahatan salah satunya seperti perkelahian antar kelompok belum dapat dijangkau dan di data oleh pihak kepolisian. Oleh karena itu aparat kepolisian sangat partisipasi masyarakat dalam hal melaporkan setiap kejadian yang mengganggu ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pangkep agar menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, Dalam wawancara Bapak Drs. Lauki Hasri, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyatakan bahwa, anggota Satpol PP merupakan perangkat Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu anggota Satpol PP di tempatkan di titik tertentu dan ditugaskan untuk melakukan patroli keliling. Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah PP Nomor 6 Tahun 2010.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya perkelahian antar kelompok yakni :
  - a. Faktor dari dalam diri pelaku yaitu adanya sifat emosional yang berlebih dan mudah tersinggung.
  - b. Faktor lingkungan, faktor lingkungan tersebut dapat berasal dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial
  - c. Faktor Minuman Keras, mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol yang berlebih dapat mempengaruhi fungsi otak sehingga seseorang dapat melakukan perbuatan di luar kesadaran yang normal.
  - d. Faktor Solidaritas, sifat fanatisme berlebih yang dimiliki seseorang dalam perkumpulan atau kelompok.
  - e. Faktor Pendidikan, sangat berperan karena kurangnya pengetahuan menyebabkan pola pikir menjadi sempit dan tidak dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman yang semakin pesat.

2. Bahwa ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian maupun pemerintah daerah setempat dalam upaya mencegah dan menanggulangi kejahatan seperti perkelahian antar kelompok, yaitu :

- a) Mengadakan sosialisasi atau penyuluhan sejak dini mengenai pentingnya keamanan dan ketertiban serta kesadaran hukum bagi masyarakat.
- b) Memberikan penanganan dan pengawasan khusus terhadap daerah yang rawan terjadinya kejahatan.
- c) Mengadakan patroli yang dilaksanakan menyeluruh oleh masing-masing anggota kepolisian.
- d) Memberikan pembinaan yang serius dengan cara membuka kesadaran berfikir dan bertindak para pelaku kejahatan agar kembali ke jalan yang benar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- e) Menugaskan anggota Satpol PP sebagai perangkat Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur.



## **B. Saran**

Terhadap Uraian kesimpulan di atas, maka penulis mempunyai beberapa saran, yaitu :

1. Untuk menekan jumlah kasus perkelahian antar kelompok maka dibutuhkan partisipasi dan kerja sama masyarakat dalam hal ini melaporkan setiap kejadian yang berpotensi menimbulkan kejahatan, di masyarakat agar pihak kepolisian dapat melakukan tindakan yang cepat dan tepat untuk mencegah terjadinya kejahatan.
2. Peningkatan penyuluhan hukum sejak dini untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
3. Menambah personil kepolisian untuk meningkatkan tindakan preventif maupun represif.
4. Meningkatkan sarana mobilitas aparat keamanan agar lebih mudah menjangkau seluruh titik rawan kejahatan yang ada di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Alam, A.S., *Pengantar Kriminologi*, Penerbit Refleksi, Makassar, 2010.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, 1986.
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Revika, Aditama, Bandung, 2010.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Ramadja Karya, Bandung, 1984.
- Farid, A.Z. Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2002*
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Mustofa, Muhammad, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013.
- Muhadar, *Mata Kuliah Kriminologi Remaja*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2010.
- Muljono Wahyu, *Pengantar Teori Kriminologi*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Sahetapy, *Teori Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1979.
- Salmi, Jamil, *Kekerasan dan Kapitalisme*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Simorangkir, J.C.T. dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Sri Utami, Indah, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.

Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

**Perundang-undangan :**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Undang-undang No.1 Tahun 1946)

Undang-undang No.11 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010

**Website :**

<http://raypratama.blogspot.com/2011/02/perkelahian-kelompok.html>

<http://irmabk.blogspot.com/konflik-sosial-dalam-kemajemukan-masyarakat.html>